



ABAIKAN K3 PADA PROYEK SAH DI JALAN BUGISAN

Sebabkan Pelajar Meninggal Dunia, Dewan Kecam Pemkot

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogyakarta melayangkan teguran keras kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) serta pihak kontraktor pelaksana menyusul insiden maut yang merenggut nyawa seorang siswi SMKN 4 Yogyakarta. Hal ini akibat pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Bugisan.

Tragedi yang menewaskan remaja berusia 16 tahun berinisial RS tersebut terjadi pada Senin (31/8), ketika sepeda motor korban tergelincir di atas tumpukan pasir material proyek yang dibiarkan tanpa rambu pengaman sebelum akhirnya masuk ke kolong truk.

Merespons insiden memilukan itu, Komisi C DPRD Kota Yogyakarta langsung memanggil jajaran DPUPKP bersama pihak kontraktor dan pengawas dalam rapat tertutup di Gedung DPRD Kota Yogyakarta pada Selasa (1/9). Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Basoro, menyatakan pihaknya tidak akan memberikan toleransi lagi terhadap kelalaian berulang yang membahayakan nyawa masyarakat

umum di area proyek infrastruktur perkotaan.

"Ini kejadian kedua. Dulu pernah ada yang masuk lubang di Umbulharjo, dan sekarang ada adik kita yang meninggal dunia. Bagi kami sudah tidak ada toleransi lagi. Rekan-rekan penyedia jasa wajib menjalankan standarisasi K3," tegas Bambang usai pertemuan. Selain menyoroti kontraktor, Bambang juga menilai fungsi kontrol dari konsultan pengawas proyek tidak berjalan optimal karena hanya sebatas mengingatkan secara lisan tanpa tindakan nyata berupa teguran tertulis.

Menanggapi desakan tersebut, pihak kontraktor akhirnya mengakui adanya kelalaian dalam penerapan keselamatan kerja di lokasi proyek

SAH dan berjanji segera melakukan perbaikan total. Komisi C mendesak DPUPKP agar bersikap tegas dan tidak lembek dalam memberikan sanksi administratif maupun teknis kepada penyedia jasa yang melanggar aturan keselamatan wajib.

Senada dengan pimpinannya, Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Agus Riyanto, turut menyayangkan masih adanya pelaksanaan proyek yang menyepelekan regulasi K3 yang sejatinya sudah berlaku sejak lama.

"Itu sudah lama, aturan itu sudah ada. Tapi di sinilah yang kemarin sering kali lalai ya, dari pelaksana itu lalai, sehingga menimbulkan hal-hal yang sekiranya tidak baik untuk pengguna jalan ataupun masyarakat," urai Agus.]

Sayangnya, usai pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar satu jam tersebut, pihak pelaksana proyek maupun perwakilan DPUPKP Kota Yogyakarta memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan apa pun kepada awak media. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005